



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)
PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6 (enam)
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 29 Oktober 2015
P u k u l	: 10.00 s.d 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara
Acara Rapat	: Mencari masukan terkait pembahasan RUU tentang Tapera
Ketua Rapat	: Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si.,MA.
Sekretaris	: Dra. Nurani Bodroini
H a d i r	: 10 dari 30 Anggota
Pemerintah	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

I. PENDAHULUAN

Setelah beberapa Anggota menandatangani daftar hadir Pansus, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menyampaikan pengantar rapat serta menjelaskan agenda RDPU pada hari/tanggal tersebut dan menyatakan rapat terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas untuk memberikan masukan terkait dengan Draft RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Setelah pihak yang diundang menyampaikan masukan-masukan terkait dengan RUU Tapera, maka Ketua Rapat merangkum hasil masukan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas.

Adapun masukan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas terhadap RUU tentang Tapera adalah sebagai berikut:

1. Untuk variabel yang independen dan dinamis sebaiknya diatur dengan peraturan turunannya, sedangkan untuk hal-hal prinsip baru diatur dalam RUU. Hal-hal prinsip yang bisa diatur dalam RUU antara lain hal-hal yang menjadi solusi permasalahan (*backlog*) yaitu aspek ketersediaan lahan, kapasitas *developer*, kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah yang harus memperhatikan unsur permasalahan *supply* dan *demand*.

2. Untuk aspek pengelolaan dana Tapera, sebaiknya difokuskan pada konteks *supply* seperti tanah. Usulannya adalah bagaimana menginvestasikan dana tersebut yang berfokus pada *supply*, yaitu melalui pembangunan rumah dan penyediaan lahan.
3. Selanjutnya pada aspek kelembagaan, harus jelas siapa yang akan mengelola dana pengerahan dari masyarakat. BP Tapera ini sesungguhnya hampir mirip dengan BPJS. Usulannya untuk menjadikan pengelolaan administrasi menjadi lebih efisien, maka sebaiknya dijadikan satu kartu saja. Bisa difungsikan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan BP Tapera sekaligus.
4. Mekanisme operasional lembaga baru tentunya memerlukan infrastruktur, untuk memudahkan hal ini bisa dijadikan satu dengan lembaga *existing*. Hal yang bisa dilakukan dan tidak memerlukan modal besar yaitu *sharing* operasional dan *sharing office* dengan pengelolaan tersendiri.
5. Pada praktiknya, mengumpulkan dana dari masing-masing individu serta menerapkan sanksi bukan hal yang mudah, masyarakat pasti bertanya-tanya mengenai manfaat pemotongan upah.
6. Perlu mempertimbangkan adanya kesamaan anggota dan penerima bantuan dengan lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan.
7. Dengan adanya permasalahan seperti di atas, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga baru. Alternatif yang bisa dilakukan adalah Tapera diselenggarakan/dititipkan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan menambah program BPJS yang sudah ada (Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan, Kematian), dimana Tapera diganti nama menjadi Tabungan Rumah Pekerja. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan iuran Jaminan Hari Tua tapi memberi tambahan manfaat berupa rumah. Dengan cara ini, pemberi kerja tidak akan merasa ada tambahan beban untuk program baru.
8. Apabila masih ingin membentuk lembaga baru, maka bisa mentransformasi lembaga yang sudah ada seperti Bapertarum-PNS, atau BTN.
9. Inti dari UU ini adalah kebersamaan seluruh warga masyarakat dengan jumlah besar dalam mobilisasi dana, disitulah letak kegotongroyongan dan akan mempercepat penyelesaian permasalahan *backlog* perumahan.
10. Harus ada sosialisasi mengenai program ini, baik mengenai kepesertaan dan manfaat yang akan diterima.

II. Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris,


Dra. Nurani Bodroini
NIP. 196007031988032001



DAFTAR HADIR

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)
PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
HARI/TANGGAL : KAMIS, 29 OKTOBER 2015**

NO URUT	N A M A	NO. ANGGOTA	FRAKSI	JABATAN	KET.
1.	Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si.,MA.	162	F-PDIP	Ketua	Hadir
2.	H. Mukhamad Misbakhun, SE.	283	F-PG	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Saiful Rasyid, MM.	384	F-P. Gerindra	Wakil Ketua	Hadir
4.	Bertu Merlas, ST.	41	F-PKB	Wakil Ketua	
5.	Sadarestuwati	201	F-PDIP	Anggota	Hadir
6.	Arteria Dahlan, ST., SH.	197	F-PDIP	Anggota	
7.	Agustina Wilujeng Pramestutui, SS.	174	F-PDIP	Anggota	
8.	H. Indra P. Simatupang, SE., MBA.	157	F-PDIP	Anggota	
9.	Ir. Ketut Sustiawan	150	F-PDIP	Anggota	Hadir
10.	H. Budi Supriyanto, SH., MH.	280	F-PG	Anggota	
11.	H. Andika Hazrumy, S.Sos.	293	F-PG	Anggota	
12.	dr. Charles Jones Mesang	301	F-PG	Anggota	
13.	H. Hasnuryadi Sulaiman	306	F-PG	Anggota	
14.	H. Willgo Zainar, SE., MBA.	379	F-P. Gerindra	Anggota	Ijin
15.	Tgk. Khaidir	325	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
16.	H. Subarna, SE., M.Si.	352	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
17.	Michael Wattimena, SE., MM.	457	F-PD	Anggota	
18.	Anton Sukartono Suratno	417	F-PD	Anggota	
19.	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si.	452	F-PD	Anggota	Hadir

NO URUT	N A M A	NO. ANGGOTA	FRAKSI	JABATAN	KET.
20.	H. Yandri Susanto, S.Pt.	494	F-PAN	Anggota	
21.	H.A. Bakri HM, SE.	464	F-PAN	Anggota	Hadir
22.	H. Nasril Bahar, SE.	461	F-PAN	Anggota	
23.	Drs. H. Musa Zainuddin	42	F-PKB	Anggota	
24.	Ir. H. Sigit Sosiantomo	114	F-PKS	Anggota	Ijin
25.	Dr. Hermanto, SE., MM.	88	F-PKS	Anggota	
26.	Drs. H. Hasrul Azwar, MM.	507	F-PPP	Anggota	Hadir
27.	H. Epyardi Asda, M.Mar.	509	F-PPP	Anggota	
28.	H. Syarif Abdullah Alkadrie	13	F-P. Nasdem	Anggota	
29.	Ahmad H.M. Ali, SE.	32	F-P. Nasdem	Anggota	
30.	Fauzih H. Amro, M.Si.	548	F-P. Hanura	Anggota	Hadir

No.	NAMA	JABATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI		
1.	Maurin Sitorus	Dirjen Pembiayaan
2.	Baby S Pipokusumo	Dir. PSPP
3.	Siti Martini	Karo Hukum
4.	Marga A.	Kasi LK Bank
5.	Adang Suhara	Kasubdit TPL
6.	Ade Suryadi	Kasubdit Kompu DJPBP
7.	Ariastuti	Kasie Taperum
8.	Hendi Hendarmin	Kasie PL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN		
1.	Elvyn G Masassya	Dirut BPJS Ketenagakerjaan
2.	Herdy Trisanto	Dirkeu BPJS Ketenagkerjaan
3.	Jeffry Haryadi DM	Direktur BPJS Ketenagakerjaan
4.	Antony Sugiarto.	BPJS Ketenagakerjaan
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)		
1.	Dr. Zainulbahar Noor	Wakil Baznas
2.	M. Suyanta	Anggota

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris,


Dra. Nurani Bodroini

NIP. 196007031988032001